



**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**
(studi dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden
Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

PUBLIC PARTICIPATION IN RURAL DEVELOPMENT
(studies in Carrying Musrenbangdes in the Village
District Grenden Puger Jember)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Arina Hidayah
NIM 080910201047

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

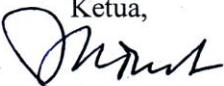
Skripsi berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember)* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Mei 2013

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,


Drs. Abdul Khaliq Azhari, M.Si
NIP. 195607261989021001

Sekretaris,


Dra. Inti Wasiati, MM
NIP. 195307311980022001

Anggota Tim Penguji,

1. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP
NIP. 198009172005012001

(.....)

2. Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

(.....)

Mengesahkan,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



RINGKASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember); Arina Hidayah, 080910201047; 2013: 127 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk mendukung sukses tidaknya suatu pembangunan. Proses paling mendasar dalam suatu pembangunan yang hendaknya melibatkan partisipasi dari masyarakat adalah dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau biasa disebut Musrenbangdes merupakan forum masyarakat tahunan oleh masyarakat desa dan pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMDesadan RKPDesa.

Namun pada kenyataannya masih banyak kasus dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih tergolong rendah karena adanya dominasi dari pihak pemerintahan desa dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sampai sejauhmanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember jika dianalisis dengan tangga derajat partisipasi menurut Khairul Muluk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi serta studi beberapa literatur. Penelitian ini menyajikan hasil penelitian berupa mekanisme

penyelenggaraan Musrenbangdes pada tahap persiapan dan pelaksanaan dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan serta menyajikan derajat partisipasi masyarakat desa Grenden dalam penyelenggaraan Musrenbangdes berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen Musrenbangdes dengan mengacu pada Tangga Partisipasi menurut Khairul Muluk.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian dimana penyelenggaraan musrenbangdes di Desa Grenden tidak semua tahap sesuai dengan Petunjuk Teknis Musrenbangdes. Terdapat beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Grenden dalam Musrenbangdes seperti tidak ditunjuknya LPMD atau organisasi lain untuk ikut terlibat dalam kepanitiaan Musrenbangdes, serta kelemahan-kelemahan teknis lainnya. Sedangkan terkait partisipasi masyarakat Desa Grenden dalam Musrenbangdes pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan keduanya berada pada derajat partisipasi konsultasi dimana telah terjadi jajak pendapat atau komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa Grenden dalam membahas perencanaan pembangunan. Namun meskipun begitu keputusan akhir perencanaan pembangunan yang disetujui atau tidak tetap berada pada kewenangan pemerintah desa atau bahkan pemerintah di atasnya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	v
DARTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Otonomi Daerah	16
2.2 Kebijakan Publik	18
2.3 Formulasi Kebijakan	19
2.3.1 Model Demokratis	21
2.4 Partisipasi Masyarakat	25
2.2.1 Derajat Partisipasi Masyarakat	31
2.5 Perencanaan Partisipatif	37
2.6 Perencanaan Pembangunan Desa	42
2.7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	45
BAB III.METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Tipe Penelitian	51
3.2 Fokus Penelitian.....	52
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53

3.5 Jenis Data.....	56
3.6 Penentuan Informan	57
3.7 Metode Analisis Data	58
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	60
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	61
4.2 Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Grenden	81
4.2.1 Tahap Persiapan Musrenbangdes.	82
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Musrenbangdes	94
4.3 Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes	102
4.3.1 Tahap Persiapan Musrenbangdes	105
4.3.2 Tahap Pelaksanaan Musrenbangdes	109
4.4 Interpretasi Partisipasi Masyarakat	115
BAB V. PENUTUP.....	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran...	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Luas Wilayah & Kependudukan Desa di Kecamatan Puger	8
Tabel 1.2 Hasil Wawancara	9
Tabel 1.3 Unsur yang Terlibat dalam Musrenbangdes	11
Tabel 2.1 Tangga Partisipasi Baru	36
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Grenden Menurut Penggunaan	62
Tabel 4.2 Hasil Pertanian Desa Grenden	63
Tabel 4.3 Jenis Kekayaan Pertambangan dan Bahan Galian Desa Grenden	64
Tabel 4.4 Status Kepemilikan Usaha Pertambangan / Bahan Galian	64
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	66
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Grenden	67
Tabel 4.7 Status Mata Pencaharian Penduduk Desa Grenden	68
Tabel 4.8 Tingkat Pengangguran Penduduk Desa Grenden	68
Tabel 4.9 Prasarana Pendidikan & Ketrampilan Desa Grenden	70
Tabel 4.10 Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Desa Grenden	70
Tabel 4.11 Prasarana Pemerintahan Desa Grenden	73
Tabel 4.12 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Grenden	80
Tabel 4.13 Masalah Utama Dusun Krajan I	84
Tabel 4.14 Masalah Utama di Dusun Karetan	85
Tabel 4.15 Masalah Utama di Dusun Kapuran	86
Tabel 4.16 Masalah Utama di Dusun Krajan II	86
Tabel 4.17 Masalah Utama di Dusun Kumitir	87
Tabel 4.18 Tahapan Penyelenggaraan Musrenbangdes	102
Tabel 4.19 Tangga Partisipasi Khairul Muluk	104
Tabel 4.20 Derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes	114
Tabel 4.21 Hasil Rekap Tilik Dusun di Desa Grenden Tahun 2012	117
Tabel 4.22 Daftar Prioritas Program	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan Demokratis	19
Gambar 2.2 Model Perumusan Kebijakan Partisipatif	24
Gambar 2.3 Tangga Partisipasi Sherry Arnstein	32
Gambar 2.4 Tangga Partisipasi Burns, Hambleton & Hogget	33
Gambar 2.5 Alur Kerja Perencanaan Program Partisipatif Skala Masyarakat	40
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles & Huberman	60
Gambar 4.1 Jumlah Kepala Keluarga Setiap Dusun di Desa Grenden	65
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Grenden	74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Grenden
3. Dokumen Musrenbang Desa Grenden Tahun 2012
4. Foto Kegiatan Musrenbang Desa Grenden Tahun 2012
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Petunjuk teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa